MINIMNYA ASPEK PELAYANAN DASAR DI KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU-MALAYSIA

¹Charlyna S. Purba, ²Urai Muhani, ³Januardi M. Diah

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: charlyna.purba@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas minimnya pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia. Menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa hingga tulisan ini dibuat, dapat ditemukan bahwa minimnya aspek pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dianalisis dari empat aspek yang menunjukkan Pertama, keterjangkauan jarak menunjukkan bahwa jarak sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu masih terlalu jauh yang berdampak terhadap kurangnya minat sekolah anak-anak di kawasan perbatasan. di tambah dengan sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan. Kedua, ketersediaan biaya yang dianggarkan untuk pembangunan fisik berupa gedung sekolah, penyediaan fasilitas belajar, pemenuhan buku pelajaran, meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru, sampai dengan menyediakan tempat tinggal (mess/rumah dinas) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, keberpihakan/keberterimaan masyarakat kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kecenderungan terhadap Malaysia dibuktikan dengan tingginya penggunaan mata uang Ringgit sebagai alat tukar belanja di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, serta mudahnya menemukan barang Malaysia di kawasan perbatasan. Keempat, kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu menjadikan masyarakat di kawasan perbatasan lebih dominan memanfaatkan fasilitas pelayanan dasar di Malaysia yang jauh lebih baik, bahkan juga dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat termasuk yang di perkotaan.

Kata Kunci: Pelayanan Dasar, Minim, Kawasan Perbatasan

PENDAHULUAN

Perwujudan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*) merupakan ujung tombak keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi (Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, 2009) serta mengambil kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain (kawasan perbatasan). Kawasan perbatasan menjadi garda terdepan sebuah negara dan memiliki potensi yang besar dalam kemajuan sebuah bangsa, maka pengelolaan kawasan perbatasan telah dimuat secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut diawali dengan dicantumkannya ketentuan mengenai wilayah negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perubahan kedua Pasal 25E menjadi Pasal 25A dengan bunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pasal ini kemudian dijadikan landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Beberapa tahun berikutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibentuk badan daerah. Akan tetapi, dalam pengaturan ini belum ditemukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Sampai pada perubahan yang dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah barulah disebutkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada Pasal 3 huruf e angka 5 yang melaksanakan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan.

Hal ini mendasari lahirnya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomis berada pada 0,50 Lintang Utara sampai 1,40 Lintang Selatan dan 111,400 Bujur Barat sampai 114,100 Bujur Timur dengan Ibukota Putussibau. Batas wilayah administratif Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- Utara : Malaysia Timur (Sarawak)
- Selatan : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi
- Timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Barat : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Sarawak. Wilayah kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kecamatan Empanang, Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Putussibau, Kecamatan Kedamin. Melalui penulisan ini peneliti akan mengkaji lebih dalam pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Denzin dan Lincoln, 2009) dengan menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Informan penelitian diperoleh dengan purposive sampling dan untuk melengkapi kebutuhan data untuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterjangkauan Jarak

Pada umumnya, keterjangkauan jarak sarana pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu masih terlalu jauh. Jarak yang ditempuh dari rumah warga ke sarana pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu lebih jauh dibandingkan ke negara Malaysia. Hal ini membuat masyarakat di kawasan perbatasan lebih memilih sarana pendidikan dan kesehatan di Malaysia.

Sarana pendidikan dan kesehatan biasanya terdapat di pusat kota, dan untuk menjangkaukannya membutuhkan waktu yang relatif lama dikarenakan kondisi jalan di kawasan perbatasan pada umumnya masih minim. Jalan beraspal ditemui di pusat perkotaan dan jalan besar, akan tetapi tidak sedikit jalan yang masih berkerikil dan jalan tanah. Rendahnya keterjangkauan ke sarana pendidikan berdampak terhadap kurangnya minat sekolah anak-anak di kawasan perbatasan, tentu hal ini berdampak terhadap masih rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia di kawasan perbatasan, termasuk di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

Setiap kecamatan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Puskesmas, akan tetapi fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat hanya ditopang oleh Puskesmas saja, terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek.

Masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan, hal ini dikarenakan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, dari 6 (enam) kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia, terdapat 1 Rumah Sakit di Kecamatan Badau, yang sebelumnya juga terdapat 1 Rumah Sakit di Putussibau Utara.

Sebagai tambahan dari aspek infrastruktur juga masyarakat di kawasan perbatasan lebih memilih berbelanja di Malaysia dikarenakan jarak yang ditempuh lebih dekat dibandingkan harus ke pusat kota yang membutuhkan biaya lebih besar.

Ketersediaan Biaya

Dari tahun ke tahun sebenarnya Pemerintah Republik Indonesia telah menyediakan biaya pendidikan sebesar 20% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Akan tetapi, angka tersebut tidak sepenuhnya dikhususkan untuk mendukung pendidikan di kawasan perbatasan semata, melainkan sudah diakumulasikan secara keseluruhan bidang pendidikan di Indonesia pada tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK.

Sehingga, tidak bisa dipungkiri ketersediaan anggaran untuk bidang pendidikan di kawasan perbatasan masih terbilang minim. Sementara itu, diperlukan anggaran yang memadai untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan fasilitas belajar, pemenuhan buku pelajaran, meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru, sampai dengan menyediakan tempat tinggal (mess/rumah dinas) untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Khusus, pembentukan wawasan kebangsaan peserta didik/siswa, diperlukan penyebaran dan perluasan pendidikan wawasan kebangsaan yang lebih intensif melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Selama ini, setiap tahun Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (BPPD Provinsi Kalimantan Barat) rutin menyelenggarakan sosialisasi mengenai Pentingnya Cinta Tanah Air dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini dilakukan di 2 (dua) kabupaten setiap tahunnya dan diadakan secara bergiliran di 5 (lima) kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia. Pada aspek kesehatan pun, sebenarnya Pemerintah Republik Indonesia memiliki program pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dikenal dengan BPJS Kesehatan. BPJS adalah lembaga khusus yang menyelenggarakan program jaminan sosial dalam bentuk kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Pemerintah Republik Indonesia sudah menyediakan anggaran yang besar untuk memenuhi bidang pendidikan dan kesehatan, pada kenyataannya fasilitas tersebut tidak berdampak secara signifikan dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, ketersediaan anggaran untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di kawasan perkotaan akan berbeda dengan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dilakukan di kawasan perbatasan. Hal ini dikarenakan akses jalan yang harus dilalui jauh lebih sulit mengingat medan yang ditempuh dan jarak yang lebih jauh sehingga membutuhkan anggaran yang besar, karena beberapa daerah di kawasan perbatasan masih terhubung dengan jembatan dan listrik yang masih terbatas. Tidak heran jika pada akhirnya, ketersediaan anggaran yang dimiliki akan menghasilkan pembangunan fisik yang berbeda dengan yang sebelumnya dianggarkan.

Keberpihakan/Keberterimaan

Banyak fakta yang membuktikan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu lebih berpihak dan berterima dengan budaya Malaysia. Hal ini berdampak terhadap proses interaksi yang terjadi antara masyarakat di kawasan perbatasan lebih cenderung dengan Malaysia sebagai negara tetangga dibandingkan dengan Indonesia.

Di satu sisi, ketika dilakukan sosialisasi dan wawasan kebangsaan di kawasan perbatasan, masyarakat di kawasan perbatasan masih menjunjung tinggi rasa cinta terhadap tanah air, akan tetapi dikarenakan banyaknya interaksi kebergantungan dengan Malaysia dalam kehidupan sehari-hari berdampak terhadap keberpihakan masyarakat di kawasan perbatasan justru cenderung kepada Malaysia. Kecenderungan tersebut terlihat dari tingginya penggunaan mata uang Ringgit sebagai alat tukar belanja di pasar kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, mudahnya menemukan barang Malaysia di kawasan perbatasan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh harga bahan pangan yang ditawarkan produksi Malaysia relatif lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri.

Terdapat kemiripan ras, budaya dan karakter antara masyarakat kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan Malaysia. Hal ini terlihat dari kemiripan warna kulit, bentuk wajah, dan ciri fisik lainnya yang menjadikan masyarakat di kawasan perbatasan ini dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Malaysia. Di tambah, iklim, cuaca dan aspek geografis yang notabene sama.

Di dalam dunia pendidikan, ketidakberpahaman/ketidakterimaan sering sekali dibuktikan dengan banyaknya tenaga kesehatan ataupun tenaga pendidik yang menolak ditempatkan di desa-desa terpencil di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dengan alasan sulitnya memenuhi akses sarana prasarana yang memadai.

Sebenarnya, hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran untuk mengabdikan terhadap negeri dan berpihak kepada negara sendiri. Sehingga, permasalahan tersebut harus disiasati sebaik mungkin agar tenaga kesehatan dan tenaga pendidik/tenaga kependidikan yang ditempatkan disana juga memiliki kesediaan untuk membangun dan memajukan pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kualitas

Terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terdapat di negara Malaysia dan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di negara Malaysia jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tidak jarang kondisi sekolah di kawasan perbatasan masih dapat dikatakan miris, hal ini dikarenakan banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruangan kelas yang terbatas. Banyak Sekolah Dasar (SD) yang hanya memiliki 4 ruangan kelas, 1 ruangan guru dan 3 ruangan belajar, sehingga jam belajar akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu jam pagi dan jam siang. Pembagian jam belajar seperti ini tidak cukup maksimal diterapkan bagi anak-anak yang masih menempuh pendidikan dasar.

Begitu juga dengan jenjang pendidikan SMP, SMA/SMK masih memiliki kualitas yang rendah, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan sarana prasarana pendukung akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan di setiap jenjang pendidikan. Dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Malaysia masih tergolong rendah, sehingga pembangunan akan sulit terwujud.

Dibutuhkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Malaysia. Upaya peningkatan IPM melibatkan banyak aspek, mulai dari pembenahan aspek lama sekolah, angka harapan hidup dan kualitas perekonomian.

Pendidikan juga berkaitan dengan kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya. Kualitas kesehatan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu relatif masih rendah. Masyarakat di perkotaan Provinsi Kalimantan Barat juga lebih memilih memanfaatkan pelayanan kesehatan di Malaysia mengingat kualitas yang jauh lebih bagus dengan biaya yang relatif lebih murah.

Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, karena kualitas pelayanan kesehatan yang diperoleh jauh lebih baik. Aspek lain infrastruktur adalah listrik yang memadai hanya ditemukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sementara di titik lainnya belum dapat dikatakan sudah baik. Masih banyak warga masyarakat yang menggunakan genset sebagai sumber penerangan di rumah-rumah. Infrastruktur jaringan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai kawasan ekonomi baru.

PENUTUP

Penelitian ini membuktikan bahwa pelayanan dasar di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia masih minim diketahui dari aspek keterjangkauan jarak, ketersediaan biaya, keberpihakan/keberterimaan dan kualitas. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menunjukkan peran yang optimal guna meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia sebagai salah satu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andriani, E., & Maisarah, M. M. (2018). Wanita dan Pendidikan: Elaborasi Makna Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi. *Al Huda*, 10, 53–72. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan2021.
2. Basuki, Agus Tri dan Utari Gayatri. (2009). Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 10 Nomor 1, April

- Tahun 2009.
3. Hanafi, Muhammad Fikri dan Sunny Ummul Firdaus. (2022) Implementasi Teori Hans Nwiasy dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022, Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Sebelas Maret Indonesia.
 4. Hidayat, Muhhamad Nizar. (2015). “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Masyarakat di Perbatasan Indonesia setelah terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Studi Kasus Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Utara, *Tesis Program Pasca Sarjana*”, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/kebijakan-pengelolaan-kawasan-dan-masyarakat-di-perbatasan-indonesia-setelah-terbentuknya-badan-nasional-pengelola-perbatasan-bnpp-studi-kasus-perbatasan-indonesiamalaysia-di-kalimantan-utara/>, diakses 17 April 2021.
 5. Imas Sholihah, Imas (2016). Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Infrastruktur berbasis Teknologi Legal Policies for Border Areas Development through Technology Based Infrastructure Volume 5 Nomor 3 Desember 2016. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
 6. Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Jenis dan Fungsi Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
 7. Lukman, Marcus (2006). Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya terbit pada *Jurnal Perspektif*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2006.
 8. Maulana, Muhammad Iqbal et al. (2019). Potensi Pembangunan Perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan; *Analytical Network Process (ANP)*. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/553/535>, diakses 17 April 2021.
 9. Permatasari, Ane. (2014). Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia. Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terbit pada *Jurnal Media Hukum* Volume 21 Nomor 2 Tahun 2014.
 10. Sudiar, Sonny. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administratif Reform*, Volume 3 Nomor 4, Oktober-Desember 2015.